

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum**

##### **4.1.1 Kondisi Keamanan Indonesia**

Indonesia mengalami masa transisi yang cukup bergejolak pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Megawati Soekarno Putri memegang tapuk kekuasaan setelah Abdurrahman Wahid memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Di tahun-tahun tersebut, Indonesia masih berusaha mengumpulkan kepercayaan internasional pasca berbagai masalah dalam negeri yang sebelumnya melanda. Tuduhan pelanggaran HAM saat menangani tuntutan kemerdekaan oleh Timor Timur dan reformasi setelah rezim Orde Baru. Bisa dikatakan, Indonesia saat itu sedang disibukkan dengan kondisi dalam negeri yang bergejolak seperti penyelesaian konflik di Aceh, Papua, dan Maluku.

Seiring dengan hal tersebut, Indonesia juga tidak bisa mengelak adanya fokus dunia dalam kebijakan Amerika Serikat pasca teror 9/11 dimana Amerika Serikat menyerang Afghanistan karena dianggap tempat bersembunyiya pimpinan Al Qaeda, Osama bin Laden. Hal tersebut membawa pengaruh ke dalam kondisi dalam negeri dimana adanya gerakan anti Amerika Serikat karena dianggap menuduh dan menyerang negara Islam.

Meski Presiden Megawati Soekarno Putri pada saat itu sudah menyatakan dukungannya terhadap kebijakan *Global War on Terror* yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, namun kondisi dalam negeri tidak memungkinkan Presiden untuk mengakui kehadiran jaringan terorisme yang berafiliasi dengan Al Qaeda di Indonesia. Meski pada kenyataannya, beberapa kota di Indonesia sudah merasakan teror bom. Presiden Megawati sadar bahwa Indonesia bergantung pada organisasi-organisasi

Islam moderat yang menentang respon politik terhadap kelompok-kelompok teror yang diidentikan dengan Islam.

Di samping itu, Pemerintah Indonesia juga memiliki prioritas lain yang diantaranya adalah menata ulang peran dan fungsi TNI – POLRI dimana keputusan tersebut menempatkan TNI dibawah Kementerian Pertahanan dan POLRI berada langsung di bawah Presiden. Reformasi sektor keamanan diharapkan dapat mendorong proses transformasi kedua lembaga tersebut guna mewujudkan TNI dan POLRI yang profesional sesuai dengan dinamika nasional, regional, maupun global yang secara tidak langsung mensyaratkan kedua lembaga ini untuk memisahkan diri dari aktivitas politik dan ekonomi dan kembali fokus mengemban tugas pokok masing-masing (Pustaka Unpad, 2007, hal. 3).

Indonesia sering disebut sebagai negara yang nyaman untuk pergerakan terorisme. Hal ini dikarenakan Indonesia dianggap memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan Indonesia tersebut antara lain; persyaratan untuk mendapatkan visa yang lemah, lalu Indonesia merupakan tujuan transit utama, dan memiliki penjagaan perbatasan yang juga lemah dimana hal tersebut akan menjadi beberapa potensi pelaku terorisme untuk menyebarkan pahamnya. Berbagai isu di kawasan perbatasan seperti maraknya aktivitas ilegal (*illegal trading, illegal fishing, human trafficking*, dll), adanya kehidupan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan yang cenderung berorientasi ke negara tetangga di beberapa titik perbatasan, terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara ilegal dan masif di beberapa lokasi dan memanfaatkan kawasan perbatasan sebagai jalur penyelundupan, rendahnya kualitas sumber daya manusia karena minimnya pelayanan sosial dasar, dan rentetan masalah itu berpotensi menjadi akar infiltrasi kelompok radikal terorisme lintas negara. Selain itu, akses senjata di Indonesia juga dianggap berlimpah karena pemerintah Indonesia dianggap kurang mengontrol perdagangan barang ilegal di perbatasan. Faktor lainnya adalah adanya

kesenjangan ekonomi, tren globalisasi, kurangnya kebebasan politik, dan adanya separatisme (Cianflone, Cull, & Fisher, 2007, hal. 16).

Setelah teror ISIS mulai melanda Asia Tenggara, Indonesia awalnya masih bersikap hati-hati untuk tidak menciptakan persepsi kebijakan anti Islam dalam upaya menghadapi ancaman ISIS. Namun, pengalaman menghadapi aksi teror pada masa JI membuat pemerintah Indonesia berkesimpulan bahwa kecenderungan tersebut harus berubah. Upaya kontra terorisme terhadap ancaman ISIS tidak hanya dilakukan oleh para penegak hukum namun juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Pernyataan yang mengecam ideologi, aktivitas, dan perilaku ISIS terus digaungkan di media baik oleh politisi atau pun tokoh masyarakat (Spooner, 2016, hal. 6).

#### **4.1.2 Terorisme di Indonesia**

Berdasarkan UU No. 15 tahun 2003, di pasal 6 disebutkan bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara yang membayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda, dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum atau fasilitas internasional.

Terorisme menjadi permasalahan global dan menjelma menjadi ancaman nyata yang dapat terjadi kapan pun di belahan dunia manapun. Perkembangan terorisme saat ini menunjukkan bawa kegiatan tersebut semakin berpotensi mengganggu stabilitas keamanan baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Berbagai bentuk ancaman dilakukan oleh teroris kepada pemerintah suatu negara atau kepada pihak-pihak yang bersebrangan dan menentang kepentingan mereka.

Mereka tidak segan untuk melakukan berbagai cara seperti pembunuhan, penganiayaan, penculikan, perampokan, intimidasi, dan pembajakan. Di dalam negeri Indonesia sendiri, beberapa konflik horizontal seperti di Poso, dan upaya disintegrasi oleh Organisasi Papua Merdeka dan beberapa gerakan separatis lainnya menggunakan pola kegiatan terorisme dalam melakukan aksinya (Marbun, 2008, hal. 2).

Pada tahun 2000, Bursa Efek Jakarta diguncang bom mobil. Bom meledak di lantai parkir yang menewaskan 10 orang dan 90 orang lainnya luka-luka. Selain itu, bom tersebut juga mengakibatkan 104 mobil rusak berat dan 57 mobil rusak ringan (Bowling, 2000). Di tahun yang sama, pada Malam Natal, serangkaian bom meledak di beberapa kota di Indonesia, seperti Batam, Pekanbaru, Jakarta, Pangandaran, Bandung, Mojokerto, dan Mataram yang merenggut 16 korban jiwa dan 96 orang lainnya mengalami luka-luka. Di tahun berikutnya, ibukota kembali mengalami serangan terorisme. Bom meledak di Gereja Santa Anna dan HKBP yang mengakibatkan 5 orang tewas. Bom juga meledak di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, yaitu Atrium Senen yang menciderai 6 orang (Tim Medpress, 2005, hal. 88). Selanjutnya, giliran salah satu restoran cepat saji di Makassar yang mengalami serangan bom meski tidak mengakibatkan korban jiwa. Permulaan tahun 2002, beberapa gereja di Palu, Sulawesi Tengah juga kembali mengalami teror bom meski tidak terdapat korban jiwa (Gatra.com, 2002).

Kondisi keamanan internasional setelah 9/11 juga berpengaruh terhadap Indonesia. Setelah Amerika Serikat memutuskan untuk menginvasi Afghanistan, aksi-aksi teror baru muncul di berbagai negara sebagai bentuk dari tindakan balasan dan menentang kebijakan Amerika Serikat tersebut. Aksi perlawanan tersebut menyasar sarana dan prasaran serta individu dari yang terlibat dan berkaitan dengan kepentingan AS dan negara Barat lainnya yang menjadi Sekutu AS (Marbun, 2008, hal. 19). Di Indonesia, tragedi buruk terjadi di Bali pada Oktober 2002. Bom meledak di dua pusat hiburan malam, Paddy's Pub dan Sari Club yang berada di

Jalan Legian, Kuta, Bali. Kedua bom tersebut meledak hampir bersamaan sekitar pukul 23.05 WITA. Belum usai kekagetan yang terjadi, kurang dari sepuluh menit kemudian, giliran daerah sekitar Konsulat Amerika Serikat terkena serangan bom meski tidak ada korban jiwa.

Ledakan di kedua pusat hiburan malam tersebut menjadi sorotan berita nasional maupun internasional. Tragedi tersebut membunuh hampir 200 orang dan ratusan lainnya terluka berat maupun ringan. Banyaknya korban tewas yang merupakan warga negara asing membuat Indonesia mendapat berbagai tekanan dari luar negeri. Nama Indonesia jelas-jelas tercoreng. Presiden Megawati pada saat itu langsung mendesak kepolisian untuk segera menuntaskan kasus tersebut bahkan dengan memberikan tenggat waktu pada bulan berikutnya.

Hasil investigasi yang dilakukan menetapkan Jamaah Islamiyah (JI) yang bertanggungjawab atas ledakan tersebut. Organisasi ini merupakan jaringan yang berafiliasi dengan Al Qaeda. Teror bom di Bali ini seakan menjadi sebuah bentuk konfirmasi akan kehadiran jaringan ini di kawasan Asia Tenggara. Ketakutan itu terbukti bahwa di kawasan dengan jumlah populasi Muslim yang besar, Asia Tenggara menjadi tempat yang nyaman bagi para kelompok radikal Muslim. (Tan, 2003, hal. 97).

Setelah Tragedi Bom Bali di tahun 2002, pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam permasalahan terorisme. Terlihat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perpu No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002. Namun upaya tersebut belum cukup membendung aksi terorisme. Tragedi bom Bali di tahun 2002 tersebut seakan menjadi pembuka rangkaian aksi teror yang dialami oleh Indonesia setelahnya.

Tepatnya pada 5 Agustus 2003 hotel JW Marriot menjadi sasaran aksi teror yang menyebabkan 11 orang meninggal, dan 152 orang lainnya

terluka. Lalu pada 9 September 2004, Kedutaan Besar Australia yang menjadi sasaran. Bom meledak di depan Kedubes tersebut yang mengakibatkan 5 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Selain itu, ledakan tersebut juga merusak beberapa gedung sekitarnya.

Bali kembali mengalami tragedi bom bunuh diri pada Oktober 2005. Kali ini daerah tepi pantai Teluk Jimbaran, di salah satu restoran tepi pantai sekitar pukul 8 malam. Daerah tersebut juga salah satu pusat wisata yang berupa tempat makan dan pusat perbelanjaan. Selain menewaskan 26 orang, bom tersebut juga menyebabkan 102 orang terluka (CNN.com, 2005). Teror membuat Bali kembali terpuruk dikarenakan hal tersebut terjadi saat Bali sedang berusaha bangkit dan meninggalkan kenangan serangan teror pada tahun 2002 di belakang seiring dengan membaiknya industri pariwisata yang menjadi andalan untuk menopang ekonomi di Pulau itu. Turis pun sudah kembali membanjiri pulau tersebut meski beberapa negara seperti Australia dan Amerika Serikat masih menerapkan *travel warning* ke Pulau tersebut. Meskipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat mendapatkan pujian dari Amerika Serikat akan upaya Indonesia menidak teroris namun ternyata ketika sebagian besar perhatian terfokus kepada Jakarta setelah serangkaian teror bom di ibukota, Bali kembali menjadi target serangan bom bunuh diri (Bonner & Perlez, 2005).

Setelah penyelidikan panjang, ditemukan dokumen di tempat persembunyian mereka dengan judul "*Bali Project*", terungkap alasan mereka kembali memilih Bali sebagai sasaran aksi teror. Disebutkan karena Bali merupakan tempat wisata yang terkenal di seluruh dunia, bahkan lebih terkenal dari Indonesia. Serangan terhadap Bali akan masuk pemberitaan media internasional dan dunia akan menangkap pesan bahwa serangan tersebut di dedikasikan untuk Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya (Wockner, 2015). Kembali, kelompok yang menjadi pihak yang bertanggungjawab atas serangan ini adalah kelompok yang sama dibalik serangan Bom Bali di tahun 2002, Jamaah Islamiyah.

Hal tersebut dikarenakan tidak ada kelompok teroris lagi yang memiliki tingkat kemampuan seperti itu dan Dr. Azahari juga menjadi otak dibelakang dua tragedi tersebut (CNN.com, 2005).

Setelah efek dari Tragedi Bom Bali II mereda, beberapa aksi teror bom masih menghantui beberapa tempat di Indonesia. Di tahun 2009, dua hotel besar di Jakarta yaitu JW Marriott dan Ritz Carlton kembali menjadi sasaran aksi terorisme. Bom meledak hampir bersamaan sekitar pukul 07.50 WIB dan menewaskan 8 orang asing (Kompas.com, 2009). Lalu di tahun 2011, ledakan bom bunuh diri pada April 2011 di Masjid Mapolresta Cirebon saat sholat Jumat membuat 25 orang terluka dan menewaskan pelaku (Kompas.com, 2011). Di tahun yang sama, tepatnya pada September 2011, ledakan bom bunuh diri terjadi di GBIS Kepunton, Solo, Jawa Tengah. Bom terjadi saat para jamaat selesai kebaktian dan mulai keluar dari gereja. Peristiwa tersebut menewaskan pelaku dan membuat 24 orang terluka (BBC.com, 2011). Aksi teror yang menasar pihak kepolisian masih berlanjut pada tahun 2013. Kali ini bom meledak di depan Masjid Polres Poso, Sulawesi Tengah yang menewaskan pelaku bom bunuh diri dan 1 petugas bangunan terluka (BBC.com, 2013).

Jakarta kembali menjadi sorotan dunia di awal tahun 2016. Kawasan Sarinah, di jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat menjadi saksi aksi terorisme dan baku tembak antara Polisi dan pelaku teror. Peristiwa tersebut dimulai dengan dua ledakan di waktu yang hampir bersamaan, yaitu di gerai kopi Starbucks dan pos polisi di depan pusat perbelanjaan Sarinah sekitar pukul 10.40 WIB. Di tengah kepanikan, pelaku mulai menembaki kerumunan polisi yang mengamankan pos polisi. Seorang pelaku lainnya menembaki warga asing di depan Starbucks. Selang beberapa menit kemudian, polisi lainnya berdatangan dan disambut dengan beberapa ledakan bom susulan. Selama 11 menit baku tembak antara sejumlah polisi dan para pelaku terjadi. Peristiwa tersebut menewaskan 7 orang yang 5 diantaranya adalah pelaku serangan dan 19 orang lainnya luka-luka (Kompas.com, 2016).

Kelompok *Islamic State of Iraq and Syria* atau ISIS mengaku bertanggungjawab atas serangan tersebut. Kepolisian juga meyakini bahwa Bahrin Naim adalah dalang dari peristiwa tersebut. Sosok tersebut merupakan warga negara Indonesia yang saat ini disinyalir sedang berada di Suriah sejak tahun 2010 dan bergabung dengan ISIS. BIN juga mengatakan bahwa semenjak Naim pergi ke Suriah, dia sudah membantu perekrutan anggota dan merencanakan serangan melawan pemerintah Indonesia. Naim juga sering dikaitkan dengan pemimpin Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yaitu Abu Wardah Santoso atau sering disebut Santoso yang sudah menyatakan sumpah setia kepada ISIS (BBC.com, 2016).

Teror Sarinah pun menjadi tanda nyata adanya jaringan ISIS di Indonesia. Sejak 2014 seruan-seruan dari Abu Muhammad Al Adnani yang merupakan juru bicara ISIS kepada orang-orang yang sudah berbaiat terhadap ISIS untuk melakukan serangan terhadap orang-orang asing yang negaranya bergabung dalam koalisi Amerika Serikat yang menyerang ISIS di Suriah dan Irak (BBC.com, 2016).

Selang setahun kemudian, terminal bus Kampung Melayu, Jakarta Timur yang menjadi sasaran bom bunuh diri pada 24 Mei 2017. Serangan yang berlangsung sekitar pukul 21.00 WIB itu menewaskan 9 orang dan 16 lainnya luka-luka. Kelompok Jamaah Ansharut Tauhid (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS mengaku bertanggungjawab atas serangan tersebut. Kelompok ini sendiri beroperasi di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Maluku. Amerika Serikat sendiri sudah menyebutkan bahwa JAD adalah kelompok teroris yang berdiri pada tahun 2015 yang terdiri dari hampir dua lusin kelompok-kelompok ekstremis Indonesia yang berbaiat kepada ISIS (Priherdityo, 2017).

ISIS sendiri merupakan kelompok militan teroris yang kuat yang menguasai wilayah-wilayah besar di Timur Tengah. ISIS dikenal karena kekerasan dan serangan brutal yang kerap mereka lakukan terhadap warga sipil. Mereka juga bertanggungjawab atas ratusan serangan teroris

di seluruh dunia, selain itu mereka juga menghancurkan monumen, kuil kuno, dan bangunan bersejarah lainnya, mereka juga menghancurkan karya seni dari jaman purbakala. ISIS sendiri terbentuk dari jaringan kelompok Al Qaeda di Irak pada tahun 2004 yang semula bernama *Islamic State of Iraq* (ISI). Ketika perang saudara di Suriah meletus, ISI berperang melawan pasukan Suriah dan mendapatkan tanah di seluruh wilayah tersebut. Di tahun 2013 kelompok ini secara resmi mengganti nama mereka menjadi *Islamic State of Iraq and Syria* atau disingkat menjadi ISIS. Tujuan dari kelompok ini adalah menciptakan negara Islam dan menerapkan hukum syariah dengan menggunakan cara-cara yang brutal bahkan Al Qaeda sendiri secara resmi menolak kelompok tersebut dan juga kegiatan mereka (History.com).

#### **4.1.3 Hubungan Indonesia dan ASEAN**

Indonesia yang merupakan negara anggota dan salah satu pendiri ASEAN, memiliki luas wilayah, jumlah penduduk, dan ukuran ekonomi yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sendiri merupakan forum komunikasi pada tingkat regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Saat ini, ASEAN memiliki tiga pilar yang menjadi pilar dari organisasi tersebut. Ketiga pilar tersebut adalah pilar politik dan keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial budaya.

ASEAN selama ini dianggap cukup berhasil dalam mengelola hubungan antar negara di kawasan Asia Tenggara dan menyediakan modalitas bagi negara-negara anggotanya untuk berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan lain di luar ASEAN. Meskipun ASEAN juga tetap mendapatkan kritik atas karakter kerjasama ASEAN yang berorientasi proses sehingga sering tidak memiliki mekanisme penegakan aturan yang jelas. Namun disamping kritik tersebut, (Choiruzzad, ASEAN di Persimpangan Sejarah: Politik Global, Demokrasi, Integrasi Ekonomi, 2014, hal. 15).

ASEAN sebagai organisasi multilateral di kawasan Asia Tenggara diharapkan dapat menjadi wadah untuk menyamakan pandangan diantara negara anggotanya. Salah satunya tentang persepsi ancaman untuk masing-masing negara. Kejahatan lintas negara atau biasa disebut *transnational crime* menjadi ancaman bagi stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Arus globalisasi, perkembangan ekonomi, dan kemajuan teknologi membuat kejahatan lintas negara ini berkembang menjadi lebih kompleks, terorganisir, dan melibatkan aktor-aktor dengan jaringan lintas negara. Oleh sebab itu, kerjasama antar negara sangat diperlukan untuk menanggulangnya (Sekretariat Nasional ASEAN - Indonesia).

Merespon serangan terorisme di Amerika Serikat, ASEAN sebagai anggota komunitas global, mempercepat laju kerjasama penanganan terorisme di kawasan. Pada KTT ASEAN ke-7 pada tanggal 5 November 2001 di Brunei Darussalam, para pemimpin ASEAN menyatakan keinginan mereka untuk mengatasi ancaman terorisme melalui *ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism*. Mereka memutuskan untuk mengintensifkan upaya mereka untuk mencegah dan menekan aktivitas kelompok teroris di wilayah mereka (Lowe, 2017). ASEAN secara aktif mengadopsi dua komponen utama dari deklarasi tentang penanganan terorisme yaitu pembentukan jaringan di antara badan penegak hukum di garis terdepan ASEAN dalam memberantas terorisme dan meningkatkan kerjasama intelijen dalam pertukaran informasi (Yong, 2005).

Upaya ASEAN dalam menangani ancaman terorisme sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum adanya tragedi 9/11. Kesadaran akan bahaya terorisme pada tahun 1997 dimana diadakannya pertemuan Pada Menteri Dalam Negeri setelah dalam dasawarsa sebelumnya dunia mengalami aksi terorisme dalam skala besar di berbagai belahannya. Pertemuan para Menteri Dalam Negeri tersebut menghasilkan *ASEAN Declaration on Transnational Crime*. Mereka membentuk *ASEAN Ministerial Meeting on*

*Transnational Crime* atau yang biasa disebut AMMTC yang telah diberikan mandat untuk melakukan koordinasi dengan badan-badan ASEAN lainnya, seperti Menteri Hukum dan Pengacara ASEAN, Kepala Polisi Nasional ASEAN, Menteri Keuangan ASEAN, Direktur Jenderal Imigrasi dan Direktur Jenderal Bea Cukai dalam penyelidikan, penuntutan, dan rehabilitasi pelaku kejahatan transnasional, termasuk terorisme internasional (Yong, 2005). Namun, dalam tataran praktis, ASEAN memberikan ruang kepada setiap negara anggotanya untuk upaya kontra terorisme dengan tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan kerjasama dengan sesama negara anggota ASEAN maupun melakukan kerjasama dengan negara-negara di luar kawasan Asia Tenggara (Yani, 2012, hal. 83).

Indonesia menyadari bahwa ancaman terorisme tidak bisa hanya ditangani sendiri. Beberapa negara-negara di Asia pun mengalami hal serupa dan dikhawatirkan aksi-aksi terorisme akan semakin menyebar ke daerah-daerah lainnya. Untuk itulah dibutuhkan upaya diplomasi untuk mengajak negara-negara di kawasan Asia Tenggara bekerjasama dalam upaya menganggulangi ancaman terorisme ini. Dalam hal ini, ASEAN sebagai organisasi tingkat regional di Asia Tenggara dinilai cukup berhasil dalam membangun rasa saling percaya antar negara-negara anggota dan dalam mencegah konflik di antara mereka. Dengan segala keterbatasannya, ASEAN berhasil menjadi kekuatan pendorong dalam upaya membangun multilateralisme di kawasan yang lebih luas dari regional Asia Tenggara itu sendiri, baik di bidang keamanan dan ekonomi (Choiruzzad, ASEAN di Persimpangan Sejarah: Politik Global, Demokrasi, Integrasi Ekonomi, 2014, hal. 15).

Hingga saat ini, terdapat pandangan yang dominan bahwa ASEAN sendiri merupakan *corner stone* dalam politik luar negeri Indonesia. Di dalam lingkaran konsentris yang menggambarkan prioritas politik luar negeri Indonesia, para diplomat Indonesia juga sering menempatkan ASEAN di dalam lingkaran konsentris yang pertama dan yang penting

(Choiruzzad, ASEAN di Persimpangan Sejarah: Politik Global, Demokrasi, Integrasi Ekonomi, 2014, hal. 123). ASEAN menjadi pijakan yang paling penting bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Pada dasarnya sejak pembentukannya, ASEAN adalah organisasi kawasan yang mendukung dan menjaga stabilitas regional dan menjadi saluran negosiasi bagi pembahasan-pembahasan tentang bagaimana menjaga stabilitas sehingga anggotanya dapat melaksanakan pembangunan dengan stabil (wapresri.go.id, 2017).

Diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam mengajak negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam kerangka ASEAN dinilai cukup berhasil dalam menanggulangi terorisme. Indonesia sendiri merupakan *lead shepherd* atau koordinator untuk isu pemberantasan terorisme. Kerja sama tersebut dilakukan melalui mekanisme *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) / ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC)* (Sekretariat Nasional ASEAN - Indonesia). Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2016, *Global Terrorism Index* menempatkan Indonesia di posisi 38 dari 163 negara, jauh lebih baik dibandingkan tahun 2003 dimana Indonesia menempati posisi 8 (*Global Terrorism Index*, 2017).

## **4.2 Analisis Data**

### **4.2.1 Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Menanggulangi Terorisme**

Terorisme berakar dari radikalisme dimana terjadi perubahan secara total dan bersifat dari dalam manusia, kelompok ini memutarbalikan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Ciri yang dapat dilihat adalah kelompok ini biasanya tidak toleran kepada kelompok lainnya, fanatik terhadap kelompok, pemimpinnya, atau ajarannya, eksklusif dan bersikap anarkis. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, pertama yaitu pertama adalah faktor internasional. Dimana adanya ketidakadilan global yang dirasakan, politik luar negeri yang arogan, dan juga penjajahan.

Selain itu faktor domestik juga berpengaruh dengan adanya persepsi ketidakadilan yang dirasakan di dalam negeri, kehidupan yang tidak sejahtera, rendahnya tingkat pendidikan, rasa kecewa dengan pemerintahan yang ada, atau balas dendam. Terakhir adalah faktor kultural yang juga dapat mempengaruhi sikap radikal seseorang yang bisa berujung pada aksi terorisme dimana para pelaku biasanya memiliki pemahaman agama yang dangkal, penafsiran agama yang sempit dan tekstual, serta indoktrinasi ajaran agama yang salah.

Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSC) No. 1373/2001 yang menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia sehingga seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib mendukung dan melaksanakannya. Susbtansi Resolusi DK PBB ini menyebutkan bahwa tindakan melawan terorisme di antaranya dapat dilakukan daengan mencegah pendanaan terhadap aksi terorisme, pembekuan keuangan para teroris, melarang warga negara untuk mendanai teroris, meminimalisir suplai senjata, serta menerapkan upaya preventif termasuk peringatan dini ke negara lain melalui pertukaran informasi (Marbun, 2008, hal. 10).

Kebijakan politik luar negeri Indonesia untuk melakukan kerjasama internasional dalam bidang pertahanan sendiri mengacu pada beberapa hal seperti pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat yang berbunyi, “.....dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”

Lalu dasar kedua adalah UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, pasal 5 ayat 1 yang menyatakan: “Hubungan luar negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional”. Selanjutnya pada pasak 5 ayat 2 yang menyatakan: “Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, dan GBHN”, sedangkan pada pasal 5 ayat 3 menyatakan: “Politik Luar

Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional". Lalu dalam pasal 5 ayat 4 bahwa: "Politik Luar Negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan" (Simamora, 2013, hal. 45).

Selain itu, Indonesia juga memiliki landasan hukum untuk melakukan kerjasama dengan negara lain dalam upaya menanggulangi terorisme dalam UU RI no. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Anti Terorisme) Pasal 43 disebutkan bahwa : (Marbun, 2008, hal. 8)

*Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, Pemerintahan Republik Indonesia melaksanakan kerja sama internasional dengan negara lain di bidang intelejen, kepolisian dan kerjasama teknis lainnya yang berkaitan dengan tindakan melawan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Sebagai lingkungan terdekat, Indonesia menjalin kerjasama dengan ASEAN. Berkedudukan sebagai anggota dan salah satu pendiri, Indonesia aktif dalam upaya kontra terorisme dalam kerangka ASEAN. Dapat dilihat bahwa ASEAN memiliki beberapa forum kerjasama untuk permasalahan tersebut. ASEAN sendiri memiliki 10 prioritas dalam kejahatan lintas negara, yakni terorisme, perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, pencucian uang, penyelundupan senjata, pembajakan laut, kejahatan ekonomi internasional, kejahatan dunia maya, penyelundupan manusia, dan penyelundupan hewan langka dan kayu ilegal (Sekretariat Nasional ASEAN - Indonesia). Bukti keseriusan negara-negara anggota ASEAN dalam penanganan terorisme dapat dilihat dari pemisahan ancaman terorisme menjadi kejahatan khusus terlepas dari kejahatan lintas negara. Hal ini merupakan konsensus dari negara-negara anggota ASEAN karena wilayah Asia Tenggara yang terdiri dari bermacam-macam agama dan etnis sangat rentan dengan ancaman

terorisme (Yani, 2012, hal. 82). Dari seluruh upaya kontra terorisme yang dilakukan oleh Indonesia, terdapat beberapa yang menjadi fokus kerjasama yang menjadi fokus bagi Indonesia di kawasan Asia Tenggara dalam ASEAN *led mechanisms* yaitu:

#### **4.2.1.1 ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime / Senior Officials' Meeting on Transnational Crime (AMMTC/SOMTC)**

Pertemuan ini merupakan pertemuan setingkat menteri yang dikhususkan untuk membahas permasalahan kejahatan lintas negara di kawasan Asia Tenggara. Pertemuan ini dilaksanakan pertama kali pada tahun 1997 dan diselenggarakan setiap dua tahun sekali. AMMTC ini juga merupakan lembaga yang dapat mengambil keputusan terhadap mekanisme-mekanisme setingkat pejabat senior yang salah satunya membawahi ASEAN *Senior Officials' Meeting on Transnational Crime* (SOMTC), dimana terdapat 10 jenis kejahatan lintas negara yang menjadi prioritasnya yaitu terorisme, perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, pencucian uang, penyelundupan senjata, pembajakan laut, kejahatan ekonomi internasional, kejahatan dunia maya, penyelundupan manusia, dan penyelundupan hewan langka dan kayu ilegal (Setnas Asean - Indonesia, 2017).

Program kerja SOMTC dalam upaya penganggulangan kejahatan lintas negara tertuang pada SOMTC *Work Programme to Implement ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime* yang dikeluarkan secara periodik setiap tiga tahun. Dimana terdapat tiga lingkup kerjasama di bawah mekanisme SOMTC yang telah memiliki pertemuan setingkat *working group* yakni terorisme, perdagangan orang, dan kejahatan dunia maya.

Indonesia sendiri menjadi *lead sepherd* dalam masalah penanggulangan terorisme. Hal ini berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota AMMTC/SOMTC dimana melihat kemampuan Indonesia dalam menanggulangi terorisme seperti yang disampaikan oleh Niken Budi Astuti

dari Direktorat Kerjasama Politik dan Keamanan ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI. Keputusan Indonesia untuk mengajukan diri sebagai koordinator kerjasama masalah penanggulangan terorisme di ASEAN didukung oleh negara-negara lainnya yang melihat kapabilitas yang dimiliki Indonesia berdasarkan pengalaman yang Indonesia punya semenjak terkena serangkaian teror bom (wawancara, Feb 2018, Kemlu).

#### **4.2.1.2 ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM) / ADMM Plus**

*ASEAN Defense Ministers' Meeting* atau yang biasa disebut dengan ADMM merupakan pertemuan bagi para Menteri Pertahanan negara-negara anggota ASEAN untuk membahas upaya penguatan kerjasama pertahanan di kawasan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, keterbukaan dan rasa saling percaya antar negara-negara anggota ASEAN. ADMM sendiri memiliki dua *platform* yaitu ADMM dan ADMM-Plus dimana ADMM digunakan sebagai sarana kerjasama antar Menteri Pertahanan anggota ASEAN dengan tujuan untuk meningkatkan *Confidence Building Measures* (CBM) dan juga menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan melalui dialog dan kerjasama praktis (Sekretariat Nasional ASEAN - Indonesia, 2017).

ADMM sendiri bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional dengan cara dialog dan kerjasama dalam pertahanan dan keamanan, untuk memberikan arahan pada pertemuan pejabat senior di bidang pertahanan dan pejabat militer dalam kerjasama pertahanan dan keamanan di dalam kerangka ASEAN dan diantara mitra wicara ASEAN. Selain itu, ADMM juga bertujuan untuk mempromosikan rasa saling percaya, kenyamanan, dan juga untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan diantara negara-negara anggota ASEAN dan yang terakhir adalah ADMM bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN yang tertuang dalam *Bali Concord II* dan untuk mempromosikan pelaksanaan *Vientiane Action Programme* pada ASC.

Sedangkan ADMM Plus sendiri adalah bentuk dari perluasan upaya kerjasama dalam hal pertahanan oleh ASEAN yang melibatkan delapan negara diluar kawasan yang disebut dengan Mitra Wicara. Delapan negara itu adalah Amerika Serikat, Australia, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Republik Korea, Selandia Baru, India, dan juga Rusia. (Sekretariat Nasional ASEAN - Indonesia, 2017).

Semenjak awal dibentuknya ADMM pada *The Inaugural Meeting of ADMM* di Kuala Lumpur pada Mei 2006 dan pada terbentuknya ADMM Plus pada Oktober 2010 di Ha Noi, banyak capaian dan kemajuan yang dialami oleh ADMM dan ADMM Plus, seperti kerjasama dalam upaya *capacity building*, pembangunan rasa saling percaya, hingga kerjasama yang sifatnya praktis dan konkret seperti yang bisa didapatkan dari peningkatan koordinasi dan interoperabilitas antar personil pertahanan dan militer negara-negara anggotanya.

Hingga pada tahun 2013, *Expert Working Group on Counter Terrorism* dalam kerangka kerja ADMM Plus mengadakan latihan bersama dan Indonesia bersama Amerika Serikat dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan acara ini. Dikatakan oleh Ditkersin Kemhan RI yang terlibat pada acara tersebut, Mayjen (Purn/Mar) Dr. Ir Syaiful Anwar, M.Bus, M.A bahwa terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah adalah hasil konsensus anggota ADMM Plus dan merupakan suatu bentuk pengakuan akan pengalaman dan kapabilitas Indonesia dalam menangani terorisme (wawancara, Feb 2018, Universitas Pertahanan).

#### **4.2.1.3 ASEAN Regional Forum (ARF)**

Dalam rangka mendorong dialog dan konsultasi yang konstruktif tentang isu-isu politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik dibentuknya *ASEAN Regional Forum* yang mulai diselenggarakan pada tahun 1994. ARF sendiri beranggotakan negara-negara ASEAN serta Amerika Serikat, Kanada, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Selandia Baru, Uni Eropa, Papua Nugini, Mongolia, Korea Utara, Pakistan, Timor Leste,

Bangladesh, dan Sri Lanka. Isu terorisme sudah lama menjadi pembahasan dalam ARF, terbukti dengan adanya serangkaian pertemuan yang membahas tentang isu terkait sejak tahun 2002 seperti ARF *Inter-Sessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Crime*, ARF *Workshop on Financial Measures Against Terrorism*, ARF *Workshop on Prevention of Terrorism*, ARF *Workshop on Counter Terrorism*, ARF CBM *Workshop on Managing Consequences of a Major Terrorist Attack*, ARF *Conference on Terrorism and the Internet*, ARF *Workshop on Counter Radicalisation*, ARF *Workshop on First Response Support for Victims of Terrorism and Other Mass Casualty Events*, ARF *Workshop on Medium to Long Term Support for Victims of Terrorism*, ARF *Workshop on Mainstreaming the Prevention of Violent Extremism in the ARF Region*, ARF *Workshop on Legislative and Non Legislative Challenges to Countering on Line Extremist Messaging* (ASEAN Regional Forum, 2017, hal. 6).

Banyaknya negara yang terlibat dalam forum ini memungkinkan adanya dialog yang lebih luas dan terjadinya saling tukar pandangan terhadap isu-isu yang berkembang di kawasan, selain itu forum ini juga digunakan untuk mempromosikan norma-norma dalam berinteraksi antar sesama negara anggota ARF (wawancara, Feb 2018,, Universitas Pertahanan).

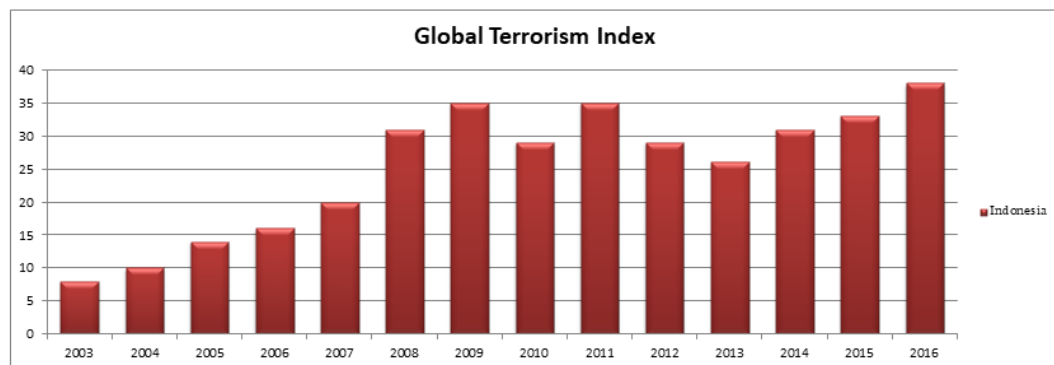
#### **4.2.2 Dinamika Citra Indonesia Pasca Aksi Terorisme**

Sorotan internasional terhadap Indonesia pasca tragedi Bom Bali 1 karena melibatkan korban yang berasal dari 22 negara dan Australia menjadi negara yang warga negaranya paling banyak menjadi korban (Putra & Hitchcock, 2005). Hal ini menjadi fokus pemerintah Australia yang dapat dilihat ketika Australia mengeluarkan *Terrorism White Paper* dan membuat beberapa terobosan dalam menangani terorisme di Asia Tenggara dimana diperlukan pendekatan pemerintah secara keseluruhan yang terkoordinasi. Dokumen ini juga menyebutkan dukungan Australia

dalam investigasi kasus pemboman di Bali dan JW Marriot dan juga memperketat pengawasan di perbatasan dan intelijen (Barta, 2004). Namun seiring berjalannya waktu yang dapat dilihat dari Buku Putih Pertahanan Australia 2009 terlihat bagaimana Australia memandang Indonesia sebagai negara mitra yang baik untuk bekerjasama dalam upaya penanganan terorisme (Australian Government, 2009). Dapat dilihat juga pada Buku Putih Australia 2013 meskipun terorisme yang mengatasnamakan Islam masih ada di Indonesia namun Indonesia dianggap berhasil untuk menangani terorisme (Australian Government, 2013, hal. 18).

Posisi Indonesia secara global dalam menghadapi terorisme dapat dilihat melalui *Global Terrorism Index* sempat menempatkan Indonesia di posisi ke 8 dari 162 negara di tahun 2003 sebagai negara yang beresiko terhadap ancaman terorisme. Lalu di tahun 2004 membaik karena Indonesia ada di posisi 10. Selanjutnya Indonesia berada di psisi 31 pada tahun 2008 namun sempat turun di tahun 2010 karena berada di posisi 29 dan kembali naik di posisi 35 pada tahun 2011. Di tahun 2013, posisi Indonesia kembali turun dan berada di posisi 26 meski di tahun 2016 Indonesia sudah berada di posisi 38 dan terakhir di tahun 2017, Indonesia menduduki posisi ke 42 dari 163 negara. Hal tersebut tergambar dari diagram dibawah ini (Global Terrorism Index, 2017):

**Grafik 4.1 Peringkat Indonesia**



Sedangkan dalam *Indonesia's Security Index*, dapat dilihat sejak tahun 2000 aksi terorisme di Indonesia terjadi peningkatan yang tajam di tahun 2003 dimana terjadi lebih dari 90 teroris yang dihukum lalu dari tahun 2004 hingga 2007 jumlah pelaku yang dihukum cukup stabil dimana berada sekitar 50 kasus. Jumlah tersebut mengalami penurunan di tahun 2008 yaitu berjumlah kurang dari 20 kasus. Sayangnya, di tahun 2010 terjadi lonjakan yang sangat tinggi hingga 100 kasus dan di tahun 2012 terjadi dibawah 40 kasus (Wibisono, 2017).

Keberhasilan Indonesia dapat dilihat dari peran Indonesia menjadi tempat belajar untuk menanggulangi terorisme. Indonesia dapat mengubah tragedi yang dialaminya menjadi lahan untuk belajar. Hal ini disebutkan oleh Asisten Deputi Kerjasama ASEAN, Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Widya Rahmanto, dalam sebuah kesempatan wawancara. Menurutnya, tragedi yang dialami Indonesia tidak terjadi di negara lain, sehingga Indonesia berkepentingan untuk menyelesaikannya. Pengalaman tersebut menjadikan Indonesia mengembangkan upayanya seperti bagaimana melakukan operasi penanganan, bagaimana memutus jaringan-jaringan terorisme, bahkan mengetahui silsilah keluarga dan orang terdekatnya. Informasi-informasi tersebut yang menjadi *bargaining power* dan sesuatu yang dijual oleh Indonesia pada dunia internasional karena secara tidak langsung, negara-

negara anggota ASEAN lainnya melihat kemampuan Indonesia dalam berkontribusi bagi stabilitas kawasan. Karena seiring berjalannya waktu, Indonesia menjadi tempat bersandar negara-negara anggota ASEAN dalam penanggulangan terorisme. Disamping itu, Indonesia juga terus bekerjasama dengan negara-negara di luar kawasan. Seperti Eropa dan Arab Saudi, namun Indonesia melakukan berbagai penyesuaian agar apa yang dipelajari dari negara lain bisa diaplikasikan dengan kondisi dalam negeri Indonesia (wawancara, Jan 2018, Kemenkopolkam).

Hadirnya badan-badan penanggulangan terorisme di dalam negeri seperti BNPT dan JCLEC, merubah citra Indonesia karena Indonesia menjadi tempat untuk pelatihan-pelatihan untuk penanggulangan terorisme yang menyangkut masalah penegakan hukum dengan mengundang banyak negara. JCLEC menjadi wadah bagi diplomasi Indonesia ke dunia untuk belajar dan training dalam hal meningkatkan kapasitas, salah satunya terorisme, yang dapat dipakai oleh seluruh dunia. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Deputi Kerjasama Regional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Dionnius E. Swasono. Di ASEAN, Indonesia menjadi sandaran untuk masalah penanganan terorisme, bahkan adanya ungkapan bahwa Indonesia adalah laboratorium terorisme dimana Indonesia memiliki formula untuk menanganinya (wawancara, Jan 2018, BNPT).

Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia lainnya, menurut Kolonel Oktaheroe Ramsi, Kasubdit Multilateral, Ditjen Kerjasama Internasional, Kemhan RI, yang melalui Kementerian Pertahanan RI, di kawasan juga bermacam-macam baik melalui regional maupun sub regional. Seperti kerjasama di Selat Malaka atau yang biasa disebut dengan *Malacca Strait Patrol*. Selain itu Indonesia juga memiliki kerjasama *Trilateral Maritime Patrol* dengan Malaysia dan Filipina di Laut Sulu. Sebagai kelanjutan dari kerjasama tersebut, Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu, dalam kerangka ADMM menginisiasi *Our Eyes* yang merupakan kerjasama intelijen guna melakukan berbagi informasi meski mekanismenya masih

diatur dalam proses pada *Joint Working Group*. Hal ini dilakukan guna mencegah hal-hal seperti tragedi dan teror bom kembali terjadi di Indonesia sambil tetap menjalankan proses deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT (wawancara, Des 2017, Kemhan).

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Implementasi Diplomasi Pertahanan Indonesia di ASEAN Dalam Isu Kontra Terorisme**

Kerjasama antar negara menjadi salah satu faktor penting dalam upaya pertahanan negara. Dalam lingkup ASEAN, stabilitas dan ketahanan regional sangat tergantung pada stabilitas dan ketahanan nasional dari masing-masing negara anggota ASEAN yang juga sangat tergantung pada situasi dan kondisi dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dari masing-masing negara. Kerjasama pertahanan dalam lingkup regional dikembangkan untuk menanggulangi masalah keamanan yang membutuhkan penanganan bersama agar tidak berkembang menjadi konflik atau perang (Simamora, 2013, hal. 21).

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global yang melihat perkembangan ancaman tidak hanya berdimensi nasional, mendorong Indonesia untuk mengembangkan hubungan kerjasama dengan negara lain, terutama dalam bidang pertahanan, baik secara bilateral maupun multilateral. Selain itu, setiap negara memiliki regulasi yang berbeda untuk menangani terorisme, oleh karena itu diplomasi merupakan instrumen yang paling fundamental untuk menjembatani regulasi-regulasi tersebut dan membangun pemahaman bersama dalam upaya memerangi terorisme (Center for Strategic Research, hal. 5).

Menurut Cottey dan Forster, salah satu kegiatan dari diplomasi pertahanan adalah terjalinnya hubungan bilateral dan multilateral antar pejabat militer dan pejabat Kementerian Pertahanan atau pejabat sipil senior (Cottey & Forster, 2004). Hal ini tergambar baik dari kegiatan AMMTC/SOMTC, ADMM/ADMM Plus, dan juga ARF. AMMTC/SOMTC

merupakan pertemuan setingkat menteri yang dikhususkan untuk membahas permasalahan kejahatan lintas negara di kawasan Asia Tenggara. AMMTC ini juga merupakan lembaga yang dapat mengambil keputusan terhadap mekanisme-mekanisme setingkat pejabat senior yang salah satunya membawahi *ASEAN Senior Officials' Meeting on Transnational Crime* (SOMTC) yang dimana salah satu prioritas program kerjanya adalah terorisme (Setnas Asean - Indonesia, 2017). Program kerja SOMTC dalam upaya penganggulangan kejahatan lintas negara tertuang pada *SOMTC Work Programme to Implement ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime* yang dikeluarkan secara periodik setiap tiga tahun. Dimana terdapat tiga lingkup kerjasama di bawah mekanisme SOMTC yang telah memiliki pertemuan setingkat *working group* yakni terorisme, perdagangan orang, dan kejahatan dunia maya. Indonesia sendiri mengambil peran sebagai *voluntary lead shepherd* di dalam kerjasama pemberantasan terorisme (Setnas Asean - Indonesia, 2017).

Pertemuan SOMTC pada 17 Mei 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia menghasilkan *Work Programme to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime 2002-2005* dimana dalam program kerja tersebut terdapat rencana aksi yang salah satunya menyangkut penanggulangan terorisme. Terdapat 6 rencana aksi dalam program kerja ini yaitu, pertukaran informasi, masalah hukum, penegakan hukum, pelatihan, pembangunan kapabilitas institusi, dan kerjasama dengan negara di luar kawasan (ASEAN.org, 2002). Sedangkan *SOMTC Working Group on Counter Terrorism* dilembagakan sejak SOMTC ke-7 yang diadakan di Vientiane, Laos pada bulan Juni 2007. Kelompok kerja ini diadakan setiap tahun dan dianggap perlu untuk memfasilitasi diskusi mengenai pengembangan kasus terorisme di kawasan ini, dan juga merupakan cara untuk meningkatkan kerjasama untuk mengatasi tantangan tersebut. Kelompok kerja dalam Kontra Terorisme juga berfungsi sebagai mekanisme permanen untuk memantau dan mengkaji

pelaksanaan *ASEAN Convention on Counter Terrorism* dan *ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism (ACPoA on CT)* (ASEAN.org, 2007).

Di tahun 2004 masih dalam kerangka AMMTC, Thailand menjadi tuan rumah untuk pertemuan *ASEAN Chiefs of Police Conference*. Indonesia sendiri diwakilkan oleh Drs. Adang Daradjatun. Pertemuan tersebut menghasilkan *Joint Communique* yang didalamnya membahas masalah terorisme dimana polisi-polisi dari negara ASEAN sepakat untuk meningkatkan pertukaran pengetahuan, intelijen, dan informasi mengenai teroris, militan, kelompok radikal, dan memberikan daftar target teroris yang beroperasi di wilayah tersebut. Pertemuan itu juga sepakat untuk membuat daftar kontak agen atau orang untuk dibagikan dengan negara anggota lainnya untuk memfasilitasi kerjasama dengan cepat. Selanjutnya, mereka juga sepakat untuk memberikan informasi intelijen dan informasi kepada anggota negara mengenai terorisme atau kegiatan kriminal lainnya yang dapat mengganggu kegiatan penting di kawasan (ASEAN.org, 2012).

Selanjutnya, *ASEAN Chiefs of Police Conference* diselenggarakan di Bali pada 16-20 Mei 2005. Jenderal Polisi Da'i Bachtiar kali ini menjadi wakil Indonesia di forum ini. Forum ini kembali menghasilkan *Joint Communique* yang salah satu bagiannya membahas terorisme. Beberapa poin yang mereka sepakati adalah meningkatkan mekanisme kerjasama dan koordinasi yang ada di antara negara-negara anggota ASEAN dalam mencegah dan menekan semua aspek kegiatan teroris sesuai dengan undang-undang nasional dan Konvensi PBB. Lalu mereka juga sepakat untuk meningkatkan kemampuan negara-negara anggota ASEAN melalui pelatihan, seminar, konsultasi dan berbagi pengalaman tentang operasi kontra terorisme. Poin berikutnya adalah mereka sepakat untuk saling menukar informasi akurat dan tepat waktu tentang tersangka teroris, organisasi mereka, dan modus operandi mereka. Poin keempat adalah telah disepakati untuk berbagi informasi dan untuk memberikan akses ke

negara-negara anggota untuk mewawancarai para teroris yang ditangkap sesuai dengan kesepakatan negara-negara anggota. Selanjutnya, mereka juga sepakat untuk memberikan bantuan kepada negara-negara anggota termasuk melacak, membekukan, dan menyita aset yang berkaitan dengan terorisme sesuai dengan kesepakatan negara-negara anggota (ASEAN.org, 2005).

Pertemuan *ASEAN Chiefs of Police Conference* berikutnya diselenggarakan di Singapura pada 2-7 Juni 2005 dan Jenderal Polisi Drs. Sutanto kali ini menjadi wakil Indonesia di forum ini. Forum ini kembali menghasilkan *Joint Communiqué* yang salah satu bagiannya juga kembali mengangkat isu terorisme dan menambahkan satu poin dalam komunikasi tersebut. Poin tambahannya yaitu, mereka sepakat untuk meningkatkan strategi yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme yang diantaranya adalah penggentaran, deteksi, rehabilitasi, deradikalisasi, dan penguatan komunitas untuk menahan ancaman terorisme di negara-negara anggota ASEAN (ASEAN.org, 2007, hal. 4).

Tahun berikutnya, giliran Brunei Darussalam yang menjadi tuan rumah *28th ASEAN Chiefs of Police Conference* pada 25-29 Mei 2008 yang mengirimkan Jenderal Polisi Drs. R. Makbul Padmanagara sebagai wakil dari Indonesia. Pertemuan ini kembali membahas tentang upaya penanganan terorisme dan menghasilkan beberapa kesepakatan untuk memperkuat dan menjalin kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam mencegah dan menekan kegiatan teroris. Komunikasi bersama ini juga mengulas laporan *1st Working Group Meeting on ASEANPOL Communication and Coordination Protocol for Crisis Management* pada Maret 2008. Selain itu mereka juga sepakat untuk mengarahkan *Working Group* untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembahasan mengenai protokol kerjasama untuk meningkatkan kerjasama dengan INTERPOL melalui koordinasi dan komunikasi untuk memperkuat dukungan dan bantuan yang dibutuhkan dari negara-negara anggota ASEANPOL (ASEAN.org, 2012).

*29th ASEAN Chiefs of Police Conference* diadakan di Hanoi, Vietnam pada 13-15 Mei 2009. Kali ini Indonesia kembali diwakili oleh Jenderal Polisi Drs. R. Makbul Padmanagara. Dalam pembahasan terorisme, komunikasi bersama ini menambahkan poin kesepakatan agar sekretariat ASEANPOL dapat mengumpulkan pengetahuan dan ahli untuk negara anggota dengan tujuan untuk mengatasi resiko yang akan dihadapi jika terjadi serangan terorisme (ASEAN.org, 2009).

Di tahun 2013, ASEAN mengadakan pertemuan dalam kerangka AMMTC+3 yang keenam dengan Laos sebagai tuan rumah. Melibatkan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Pada pertemuan ini ASEAN melakukan AMMTC pertama dengan melibatkan Jepang. Bersamaan dengan peringatan 40 tahun kerjasama yang dijalin ASEAN dengan Jepang, para Menteri negara anggota ASEAN dan Jepang sepakat untuk meningkatkan kerjasama diantara mereka dalam menanggulangi terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan. Para Menteri juga bertukar pandangan mengenai isu-isu yang menjadi kepentingan bersama terkait kerjasama ASEAN dan Jepang dalam melawan terorisme dan memerangi kejahatan lintas negara. Para Menteri yang terlibat juga menggarisbawahi perlunya dialog yang lebih baik antar pejabat yang menangani masalah terorisme di kawasan melalui berbagai forum, termasuk *ASEAN-Japan Counter Terrorism Dialogue* dan mengharapkan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan yang lebih jauh dalam bidang kontra terorisme. Dalam hal ini, para Menteri juga menyambut baik inisiatif yang digagas Jepang yaitu peluncuran database bersama situs web yang berkaitan dengan terorisme, dan juga *Regional Counter Terrorism Conference* yang fokus pada perkembangan terorisme dan upaya kontra terorisme di Asia Tenggara, serta pelatihan dan dialog untuk kontra terorisme internasional (ASEAN.org, 2013).

*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* yang ke sepuluh berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada 29 September

2015. AMMTC kali ini menyepakati bahwa ASEAN akan mengadopsi dan menandatangani *Kuala Lumpur Declaration in Combating Transnational Crime* dan menyetujui untuk mengadakan AMMTC setiap tahun, bukan dua tahun sekali mulai tahun 2016. Pertemuan ini juga menambahkan tiga lingkup kerjasama baru yaitu perdagangan gelap satwa liar, perdagangan kayu ilegal, dan penyelundupan manusia (Parameswaran, 2017).

Dalam AMMTC kali ini juga berlangsung AMMTC dengan Jepang untuk kedua kalinya pada 1 Oktober 2015. Pertemuan ini kembali dilakukan untuk bertukar pandangan dan kepentingan bersama pada isu kontra terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya. Pada pertemuan ini, para Menteri sepakat untuk kembali meningkatkan kerjasama yang sudah ada dan secara berkesinambungan dengan tujuan untuk mencegah ancaman yang dengan cepat berubah. Pertemuan ini juga menyatakan keseriusan mereka dan menegaskan kembali pentingnya memperkuat kapasitas anti terorisme dan kerjasama antar negara terkait. Selain itu, memajukan forum dialog dan meningkatkan berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman juga dibutuhkan dalam upaya pemberantasan terorisme yang salah satunya melalui *ASEAN-Japan Counter Terrorism Dialogue* (ASEAN.org, 2015). Banyak hasil pertemuan dalam kerangka AMMTC/SOMTC ini yang membahas tentang upaya kontra terorisme. Salah satunya *Joint Communique* atau Komunike Bersama yang didalamnya sepakat untuk meningkatkan pertukaran pengetahuan, intelijen, dan informasi mengenai teroris, militan, kelompok radikal, dan memberikan daftar target teroris yang beroperasi di wilayah tersebut. Selain itu, pertemuan itu juga sepakat untuk membuat daftar kontak agen atau orang untuk dibagikan dengan negara anggota lainnya untuk memfasilitasi kerjasama dengan cepat, mereka juga sepakat untuk memberikan informasi intelijen dan informasi kepada anggota negara mengenai terorisme atau kegiatan kriminal lainnya yang dapat mengganggu kegiatan penting di kawasan (ASEAN.org, 2012).

Selain itu, perkembangan dari forum ini juga menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan mekanisme kerjasama dan koordinasi yang ada diantara negara-negara anggota dalam mencegah dan menekan semua aspek kegiatan teroris sesuai dengan undang-undang nasional dan Konvensi PBB. Lalu mereka juga sepakat untuk meningkatkan kemampuan negara-negara anggota ASEAN melalui pelatihan, seminar, konsultasi dan berbagi pengalaman tentang operasi kontra terorisme. Poin berikutnya adalah mereka sepakat untuk saling menukar informasi akurat dan tepat waktu tentang tersangka teroris, organisasi mereka, dan modus operandi mereka. Poin keempat adalah telah disepakati untuk berbagi informasi dan untuk memberikan akses ke negara-negara anggota untuk mewawancarai para teroris yang ditangkap sesuai dengan kesepakatan negara-negara anggota. Mereka juga sepakat untuk memberikan bantuan kepada negara-negara anggota termasuk melacak, membekukan, dan menyita aset yang berkaitan dengan terorisme sesuai dengan kesepakatan negara-negara anggota (ASEAN.org, 2005).

ASEAN sebagai organisasi yang dikenal sebagai organisasi yang enggan terlibat dalam hal yang melanggar kedaulatan negara anggotanya, mulanya gagasan komunitas keamanan ini tidak begitu populer. Namun, pada akhirnya ASEAN harus menyesuaikan diri dengan tantangan keamanan non tradisional yang bersifat kejahatan lintas negara. Oleh sebab itu, hadirnya ADMM dan ADMM Plus diadakan dengan tujuan untuk berdialog secara terbuka dan konstruktif mengenai masalah keamanan regional yang dapat terjadi. Komunitas keamanan ASEAN berbeda dengan aliansi militer seperti yang dilakukan oleh NATO dimana menerapkan pertahanan kolektif yang berarti sebuah serangan terhadap satu negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota NATO. ASEAN dalam komunitas keamanannya menekankan pentingnya membangun langkah-langkah yang dapat membangun rasa saling percaya diantara negara-negara anggotanya untuk menangani isu-isu sensitif seperti masalah pertahanan negara. ADMM dan ADMM Plus

adalah bukti tindakan diplomasi pertahanan untuk menjamin perdamaian dan stabilitas keamanan regional (Gnanasagaran, 2017).

ADMM menetapkan *roadmap* tiga tahun yang menguraikan prioritasnya sesuai dengan agenda untuk mendukung keterlibatan pertahanan dan keamanan praktis. Sejauh ini, ADMM sudah melakukan lokakarya, latihan militer bersama, pembuatan dokumen dan prosedur operasi standar dan kerangka kerja untuk kerjasama dalam situasi tanggap darurat dan kerjasama pertahanan multilateral (Gnanasagaran, 2017). Implementasi kerjasama yang disebutkan tadi tertuang dalam *ADMM Plus Experts' Working Groups* (EWGs) pada tujuh area kerjasama yang sudah disepakati, salah satunya *ADMM Plus Expert's Working Group on Counter Terrorism* (EWG on CT) dengan memfokuskan pada kerjasama yang bersifat praktis, seperti latihan bersama (*Field Training Exercise* (FTX) dan *Table Top Exercise* (TTX)).

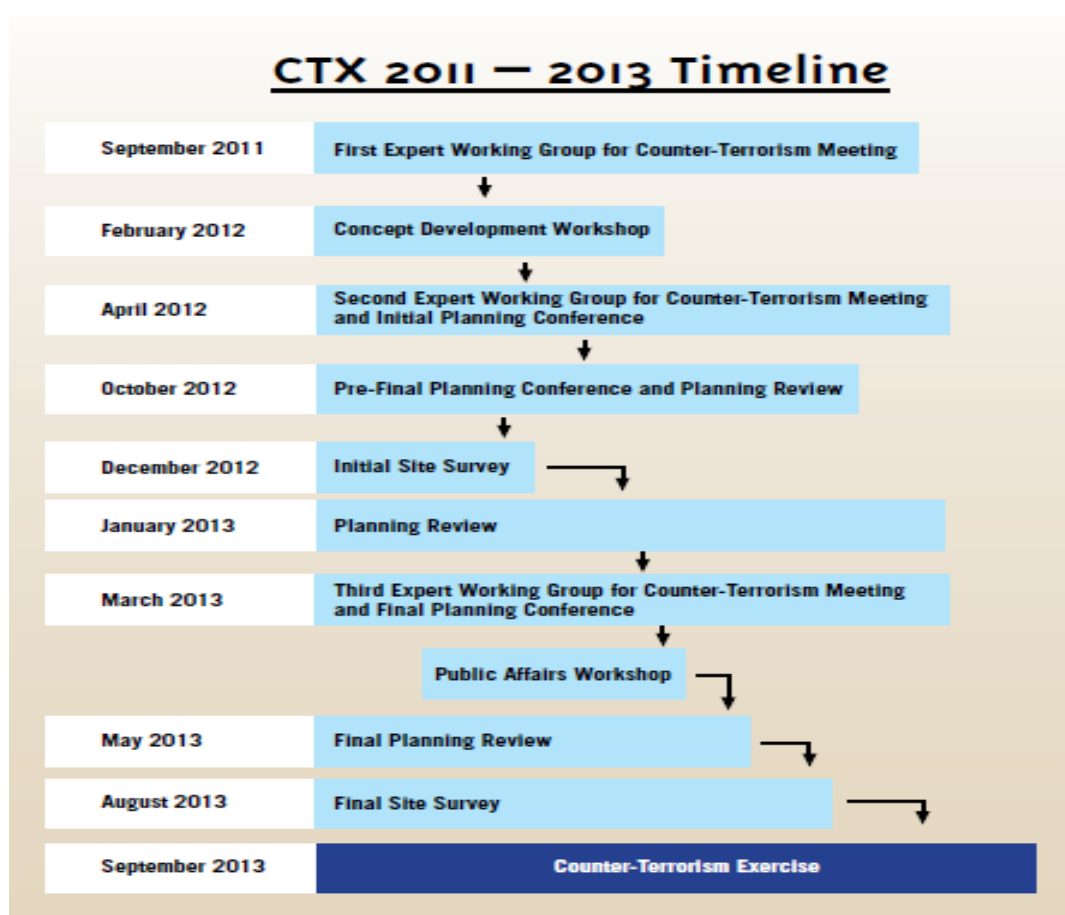
Aktifitas diplomasi pertahanan selanjutnya menurut Cottey dan Forster adalah latihan militer baik secara bilateral maupun multilateral. Kerangka kerjasama multilateral yang dilakukan oleh ASEAN membuat negara-negara anggota ASEAN dapat melakukan latihan militer multilateral (Cottey & Forster, 2004). Implementasi diplomasi pertahanan seperti ini dapat dilihat dari kegiatan *counter terrorism* yang dilakukan melalui saluran ADMM Plus. Sebagai bentuk dari perluasan kerjasama yang dilakukan ASEAN, ADMM Plus sendiri mengadakan aktifitas latihan bersama dengan negara-negara yang terlibat. Implementasi nyata yang dilakukan Indonesia adalah dengan menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan *ADMM Plus Counter Terrorism Exercise* di kawasan Indonesia *Peace and Security Center* (IPSC) Sentul, Bogor pada tanggal 9-13 September 2013 ([admm.asean.org](http://admm.asean.org), 2017).

Kegiatan diplomasi pertahanan dapat terlihat dari adanya *ADMM Plus Counter Terrorism EWG on Counter Terrorism* (EWG on CT) yang pertama kali diadakan pada September 2011 yang menjadi pertemuan multilateral tahunan antar pejabat militer, Kemhan, dan sipil lainnya

(ADMM Plus, 2013, hal. 11) dimana kegiatan kerjasama tertuang dalam *ADMM Plus Experts' Working Groups* yang salah satu area kerjasamanya adalah terorisme yaitu dalam *ADMM Plus Experts' Working Groups on Counter Terrorism* (EWG on CT). ADMM Plus EWG on CT yang pertama kali diadakan pada September 2011 yang menjadi pertemuan tahunan (ADMM Plus, 2013, hal. 11) membahas rencana untuk melakukan latihan bersama dalam *Counter Terrorism Exercise* dan Indonesia mengambil peran sebagai tuan rumah, tepatnya di kawasan Indonesia *Peace and Security Centre*, Sentul, Jawa Barat.

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan latihan bersama tersebut tergambar dalam bagan berikut (ADMM Plus, 2013):

**Gambar 4.1 Lini Waktu CTX 2011-2013**



Seiring dengan tujuan ADMM untuk membangun CBM dan *capacity building*, Mayjen (Purn/Mar) Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Bus., M.A mengatakan dalam kesempatan wawancara, bahwa Indonesia memiliki kepentingan eksternal maupun internal dalam mengambil peran sebagai tuan rumah dalam masalah *counter terrorism* ini. Secara eksternal, Indonesia berkepentingan untuk menjalin kerjasama dikarenakan Indonesia memiliki kemampuan dan pengalaman dalam masalah terorisme ini. Selanjutnya kepentingan internalnya, Indonesia ingin mengetahui bagaimana pola kerjasama institusi dalam negeri dari negara-negara lainnya dalam berintegrasi mengatasi terorisme. Dengan menjadi tuan rumah, Indonesia bisa mengajak banyak K/L terkait untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan latihan bersama ini (wawancara, Feb 2018, Universitas Pertahanan).

Latihan bersama ini menghasilkan peningkatan pemahaman atas lingkungan ancaman, beragam latar belakang dari ahli yang turut serta pun menambah kekayaan ilmu yang didapat, meningkatkan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat, upaya persatuan yang lebih besar, serta lebih menekankan pada program pendidikan dan latihan. Selain itu juga diharapkan pertemuan ini menjadi suatu upaya untuk meningkatkan kapabilitas kontra terorisme regional, meningkatkan interoperabilitas dan kesadaran situasional, membangun rasa saling percaya, saling pengertian, dan transparansi diantara negara-negara yang berpartisipasi (ADMM Plus, 2013, hal. 46).

Dalam kegiatan ini, para peserta menjalankan beberapa kegiatan yang pertama adalah *Table Top Exercise* yang merupakan suatu bentuk diskusi yang menyangkut hipotesis ancaman terorisme yang melibatkan kurang lebih 70 orang yang berpartisipasi dan 17 orang pengamat dan 18 negara ADMM Plus. Hasil yang didapat dari kegiatan ini adalah untuk dijadikan masukan bagi rencana ADMM Plus kedepannya. TTX menyoroti kompleksitas dari pengambilan keputusan strategis untuk eksekusi taktis, dan menunjukkan kesenjangan yang diciptakan dalam "otoritas dan

persetujuan” saat misi melalui tingkat strategis hingga taktis pada level pengambilan keputusan (ADMM Plus, 2013, hal. 16).

Selanjutnya, *Practical Exercise* (PE) diadakan bersamaan dengan TTX, peserta PE juga menghadiri sesi di kelas dan di lapangan, dimana peserta dikenalkan dengan ancaman bom improvisasi yang umum, dan berbagai praktek terbaik mengenai berbagai prosedur terkait anti terorisme. Peserta yang dibagi dalam kelompok ini mempresentasikan Taktik, Teknik dan Prosedur, dan Tindakan negara masing-masing jika menghadapi kondisi yang di skenarioikan. Kemudian, dalam kelompok tersebut secara kolektif berkumpul dan menyusun rencana kelompok berdasarkan TTPs masing-masing negara. PE, dengan mencampurkan pelatihan lewat ceramah di kelas dan praktek lapangan, menunjukkan dukungan militer untuk otoritas sipil, mempromosikan membangun kepercayaan bersama melalui aktivitas transfer pengetahuan dan latihan, serta menunjukkan kepemimpinan Indonesia (ADMM Plus, 2013, hal. 29-30).

Indonesia juga berfokus pada *Maritime Security* (MS) dan *Counter Terrorism* (CT) yang sudah berhasil melakukan latihan bersama di Brunei Darussalam dan Singapura pada Mei 2016 yaitu *ADMM Plus Maritime Security and Counter Terrorism Exercise* (MCTX) dengan skenario penanggulangan ancaman terorisme di wilayah laut. Selain itu, kemajuan kerjasama dalam keamanan maritim ditandai dengan dibentuknya *ADMM Direct Communication Link* (DCL) yang merupakan jalur komunikasi cepat untuk merespon situasi darurat dalam konteks keamanan maritim di kawasan (Sekretariat Nasional ASEAN - Indonesia, 2017).

Hubungan multilateral antar pejabat lainnya juga dapat tergambar dari kegiatan ASEAN Regional Forum (ARF) yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 1994. Selain sepuluh negara anggota ASEAN, forum ini melibatkan negara lainnya di Asia Pasifik seperti Amerika Serikat, Kanada, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Selandia Baru, Uni Eropa, Papua Nugini, Mongolia, Korea Utara,

Pakistan, Timor Leste, Bangladesh, dan Sri Lanka. ARF telah menjadi wadah bagi negara-negara anggotanya untuk saling berbagi informasi dan mendorong transparansi dalam melakukan praktek diplomasi pertahanan serta dalam menerbitkan kebijakan dan surat kabar militer pertahanan. Transparansi tersebut tentunya diharapkan mampu untuk mengurangi rasa saling curiga antar negara. Sehingga dalam kenyataannya, ARF telah menjadi institusi yang sangat membantu dalam meredakan tensi yang ada pada krisis intra kawasan (Emmers, 2003, hal. 35).

Isu terorisme sendiri merupakan salah satu isu yang juga menjadi perhatian dari ARF, hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai macam pertemuan yang membahas isu terkait sejak tahun 2002 seperti *ARF Inter-Sessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Crime*, *ARF Workshop on Financial Measures Against Terrorism*, *ARF Workshop on Prevention of Terrorism*, *ARF Workshop on Counter Terrorism*, *ARF CBM Workshop on Managing Consequences of a Major Terrorist Attack*, *ARF Conference on Terrorism and the Internet*, *ARF Workshop on Counter Radicalisation*, *ARF Workshop on First Response Support for Victims of Terrorism and Other Mass Casualty Events*, *ARF Workshop on Medium to Long Term Support for Victims of Terrorism*, *ARF Workshop on Mainstreaming the Prevention of Violent Extremism in the ARF Region*, *ARF Workshop on Legislative and Non Legislative Challenges to Countering on Line Extremist Messaging* (ASEAN Regional Forum, 2017, hal. 6).

Dalam kerangka ARF, penanganan terorisme tertuang dalam *ARF Work Plan on Counter Terrorism and Transnational Crime (CTTC)*. Work Plan ini memprioritaskan kebutuhan akan suatu kerjasama praktis diantara anggota ARF dalam menangani terorisme dan kejahatan lintas negara. Beberapa langkah nyata yang telah dilaksanakan dalam kerangka ARF adalah kerjasama dalam peningkatan kapasitas, pertukaran informasi data intelijen, pelatihan, latihan bersama, serta pelaksanaan seminar (ASEAN Regional Forum, 2011). Tipe proyek kerjasama yang

dilakukan adalah pembangunan kapasitas. Program pembangunan kapasitas ini dapat mengambil berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan dan area prioritas seperti (ASEAN Regional Forum, 2015, hal. 8-9) :

- a. Pelatihan Sukarela dari pusat pelatihan regional (SEARCCT, JCLEC, ILEA, dan lainnya) untuk menyediakan pengembangan kapasitas di area prioritas. Semua anggota ARF akan mengirimkan ahli untuk latihan yang diselenggarakan.
- b. Seminar pengembangan kapasitas yang didalamnya bertujuan untuk berbagi informasi dan pengalaman serta menghadirkan pihak pemerintah, sektor swasta, dan pakar terkait lainnya untuk memberikan pelatihan singkat dan mengembangkan praktek terbaik.
- c. Proyek percontohan ARF yang memanfaatkan dana yang diberikan kepada ARF *Fund* untuk bantuan teknis atau pengembangan kapasitas yang diajukan oleh satu atau lebih negara-negara ARF. Proyek ini harus berada dalam lingkup prioritas ARF dan dapat diimplementasikan oleh lembaga pemerintah yang bekerjasama dengan sektor swasta.
- d. *Multilateral Tabletop* dan *Field Exercises* akan menguji pelaksanaan kesepakatan internasional, pengaturan regional, atau cara komunikasi, berbagi intelijen dan koordinasi antara ARF yang berminat dan peserta sub regional.

Dalam lingkup regional, diplomasi pertahanan seperti hal yang dijabarkan diatas bermanfaat bagi negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat rasa saling percaya dan juga dapat menangani musuh bersama dimana dalam era globalisasi saat ini, ancaman non tradisional seperti terorisme sudah menjadi momok yang dihadapi oleh negara.

Forum-forum multilateral di atas sebagai instrumen untuk membangun kerjasama dimana merupakan salah satu fungsi diplomasi pertahanan yang menampilkan peran politik dan juga sebagai simbol dari

keinginan suatu negara, Indonesia dalam hal ini, untuk mewujudkan kerjasama yang lebih luas, membangun rasa saling percaya, dan komitmen untuk menyatukan perbedaan-perbedaan dan menemukan titik temu.

Dalam tiga karakteristik diplomasi pertahanan yang dituangkan oleh Rodon Pedrason, forum-forum dalam kerangka ASEAN tersebut selain membangun kepercayaan, diplomasi pertahanan yang dilakukan dapat mencegah konflik melalui persepsi yang diperkuat dengan adanya kepentingan bersama yaitu menanggulangi terorisme. Setelah itu, rasa saling percaya dan pengertian bisa dibangun dan wilayah kerjasama yang lebih luas dapat dicapai. Hal ini menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan luar negeri Indonesia dan tujuan keamanan yang lebih luas dengan adanya dukungan dari negara lain.

#### **4.3.2 Kontribusi Diplomasi Pertahanan dalam Pembentukan Citra Indonesia**

Diplomasi pertahanan awalnya ditujukan untuk memperkuat kapabilitas pertahanan negara-negara sekutu bukan menjadi sebuah instrumen untuk membangun hubungan kerjasama dengan pihak lawan guna membantu mencegah potensi konflik (Cottey & Forster, 2004). Sedangkan secara teoritis, salah satu tujuan diplomasi pertahanan adalah untuk memberikan penjelasan tentang apa yang suatu negara kerjakan, membentuk opini publik (Simamora, 2013, hal. 31).

Seiring dengan tujuan dari diplomasi pertahanan yang digunakan untuk membangun rasa saling percaya untuk mencegah konflik (CBM), pengembangan kapasitas, dan meningkatkan hubungan sipil-militer (Cottey & Forster, 2004), bentuk kerjasama internasional yang dikembangkan oleh Indonesia juga untuk membangun kepercayaan (CBM), pembangunan kapasitas (*capacity building*), ikut serta dalam perdamaian dunia, pendidikan, pelatihan, serta upaya-upaya diplomasi melalui dialog pertahanan strategis, dialog keamanan, dan kemitraan

strategis sesuai kebijakan pemerintah (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015, hal. 42-43).

Citra bangsa dianggap penting oleh Indonesia karena Indonesia ingin menjadi lebih kompetitif di arena global, menambah turis yang datang ke Indonesia, menambah dan meningkatkan investasi, dan meningkatkan nilai ekspor non migas dari Indonesia (PresidenRI.go.id, 2016). Brown menyatakan dalam jurnalnya, terdapat beberapa perspektif untuk melihat citra suatu negara, yaitu yang pertama adalah *actual image* atau bisa dikatakan sebagai reputasi atau *stereotype*. *Actual image* ini merupakan citra suatu negara menurut negara lainnya. Pasca *Global War on Terror* yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dalam menyikapi serangan 9/11, Indonesia mendapatkan perhatian bersama Sudan, Kolombia, Filipina, Georgia, dan Uzbekistan (Crelinsten, 2009, hal. 36).

Selain itu, rawannya negara-negara di Asia Tenggara sebagai sasaran aksi terorisme ditandai dengan adanya peringatan perjalanan atau *travel warning* yang dikeluarkan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan ke negara-negara di Asia Tenggara (Sukawarsini Djelantik, 2010, hal. 212). Presiden Amerika Serikat juga mendeskripsikan kawasan Asia Tenggara sebagai basis kedua perang terhadap terorisme. Hal tersebut tidak mengejutkan mengingat di kawasan tersebut terdapat beberapa negara yang termasuk dalam rencana Al Qaeda seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Indonesia (Acharya A. , 2006).

Di masa itu, Indonesia juga sedang dalam upaya pembangunan kembali citra nasional pasca masalah dalam negerinya yang di cap sebagai pelanggaran HAM oleh masyarakat internasional. Upaya yang sedang dilakukan tersebut semakin sulit karena adanya serangan bom yang dikenal dengan Bom Bali I dan II serta serangkaian serangan bom lainnya di ibukota dan beberapa kota lainnya. Indonesia semakin terpuruk dengan kehilangan kepercayaan internasional. Kondisi dalam negeri Indonesia juga tidak begitu menguntungkan. Pasca reformasi, kondisi

ekonomi Indonesia tidak begitu baik. Belum lagi masalah hubungan sipil militer yang menjadi fokus setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Penegakan hukum pun menjadi permasalahan lain yang harus di hadapi Indonesia pada saat itu.

Sorotan internasional kepada Indonesia juga dirasakan dari negara di kawasan. Perdana Menteri Singapura Lee Kwan Yew bahkan sempat mengungkapkan pernyataan bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman bagi pemimpin teroris internasional dan Singapura akan beresiko terkena serangan terorisme jika pimpinan JI, yaitu Abu Bakar Baasyir yang berada di Indonesia tidak ditangkap oleh pihak yang berwenang di Indonesia. Pernyataan tersebut sempat membuat panas kuping pemerintah dan juga masyarakat Indonesia. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono, menyayangkan pernyataan Lee Kwan Yew tersebut karena Indonesia memiliki kerjasama dengan Singapura mengenai penanggulangan terorisme (Tempo, 2003). Belum lagi adanya *travel warning* yang diberlakukan oleh beberapa negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan sejumlah negara Eropa ke Indonesia yang pasti berdampak dengan penurunan wisatawan asing ke Bali. Peristiwa tersebut tidak hanya berdampak pada sektor wisata tapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap seluruh sektor dalam perekonomian Indonesia (Lesperssi, 2008).

Kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia juga merupakan hal yang harus disikapi dengan cermat terkait *Islamophobia* yang berkembang pasca 9/11 dan kegiatan kelompok teroris di Indonesia selama ini berbasis agama. Promosi Islam Moderat yang gencar dilakukan untuk mempromosikan bahwa masyarakat Islam di Indonesia tidak menganggap kekerasan apalagi melakukan teror sebagai jalan yang diperbolehkan. Selain itu juga, mempromosikan Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia merupakan bukti bahwa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam

agama, suku, dan kepercayaan bisa berdemokrasi dan menjadi contoh untuk negara lainnya (wawancara, Feb 2018, Kemlu).

Masuknya ISIS di Asia Tenggara dan sudah melakukan aksinya di beberapa negara di kawasan tersebut membuat penanganan terorisme di Indonesia nampaknya belum berakhir walau beberapa pelaku utama dari aksi teror di tanah air sudah di tangkap. Meskipun tingkat ancaman terorisme di Indonesia meningkat karena faktor kehadiran ISIS, mereka tetap berada jauh di bawah dekade tahun 2000-an, ketika teroris yang terkait dengan JI, banyak di antaranya mantan Mujahdin yang telah berlatih di Afganistan dan Pakistan Utara pada akhir 1980an, mengumpulkan serangkaian serangan mematikan yang mengakibatkan lebih dari 300 kematian dan seribu luka serius (Fealy, 2017).

Isu kejahatan lintas negara yang sudah menjadi ancaman terhadap keamanan global, kejahatan ini juga menjadi ancaman serius dan menjadikan tantangan bagi stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sendiri melihat terorisme sudah menjadi isu keamanan sentral yang juga dialami Indonesia. Terorisme memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui jejaring sosial untuk memperkuat jaringan globalnya guna mendapatkan persenjataan, dukungan finansial maupun tempat-tempat berlindung (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015, hal. 12).

Penjabaran diatas menggambarkan kondisi citra Indonesia pada saat itu yang tidak begitu menguntungkan. Pernyataan, aksi, dan situasi yang terjadi terhadap Indonesia merupakan serangkaian asosiasi yang dipercaya oleh pihak luar sehingga membentuk citra Indonesia pada saat itu yang tidak begitu menguntungkan bagi Indonesia.

Perspektif yang kedua adalah *projected image* atau citra yang sedang dibentuk dan dikomunikasikan kepada dunia meski mungkin bukan citra sebenarnya dari suatu negara. Inilah proses bagaimana Indonesia mempromosikan dirinya ke dalam pergaulan internasional dimana salah satunya dengan menggunakan diplomasi pertahanan.

Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum yang membahas masalah terorisme membangun CBM dengan negara anggota ASEAN lainnya, dalam AMMTC/SOMTC misalnya. Sebagai badan pembuat kebijakan dan koordinasi tertinggi dalam kerjasama ASEAN mengenai kejahatan lintas negara, Indonesia mengambil peran sebagai *lead shepherd* dalam masalah kontra terorisme. Forum ARF juga memberikan keuntungan kepada Indonesia dimana dengan keikutsertaannya, Indonesia dapat mengembangkan profil internasionalnya melalui peran dan kepemimpinannya dalam ASEAN terutama dalam isu terorisme. Dalam ARF, Indonesia juga dapat mendorong komitmen kawasan untuk mengembangkan kerjasama di berbagai isu yang menjadi perhatian bersama yang salah satunya adalah terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya.

Sebagai *lead shepherd* di ASEAN, Indonesia mendapatkan manfaat yaitu image atau citra yang terbentuk. Dipercayanya Indonesia merupakan bentuk kepercayaan dari negara partisipan bahwa Indonesia mampu berperan aktif dalam permasalahan terorisme, sebab dalam penanganan terorisme, Indonesia sudah dianggap lebih maju sehingga dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan. Negara-negara ASEAN lainnya atau bahkan diluar anggota ASEAN sendiri, menjadikan Indonesia sebagai kiblat dan tempat untuk berkonsultasi dalam penanganan terorisme (wawancara, Feb 2018, Kemlu).

Di samping mendapatkan citra diatas, keuntungan Indonesia menjadi *lead shepherd* adalah Indonesia dapat mendorong suatu kerjasama untuk menangani terorisme dimana jika kerjasama itu berhasil disetujui berarti Indonesia secara tidak langsung akan mendapatkan bantuan negara lain dalam hal pencegahan teroris masuk ke Indonesia. Sehingga, selain Indonesia dianggap memberikan kontribusi untuk keamanan regional, keamanan nasional Indonesia sendiri juga terjaga (wawancara, Feb 2018, Kemlu).

Selanjutnya lewat forum ADMM / ADMM Plus, Indonesia juga berupaya membangun CBM lewat pertemuan-pertemuan para Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN dan negara mitra lainnya yang terlibat dalam ADMM Plus dalam menghadapi ancaman terorisme. Kementerian Pertahanan RI sendiri menyatakan bahwa terorisme merupakan ancaman nyata yang dihadapi Indonesia saat ini yang membutuhkan kerjasama dengan negara lain untuk mengatasinya dikarenakan ancaman ini sudah melewati batas-batas negara. Selain itu dalam ADMM Plus, Indonesia juga menjadi tuan rumah dalam latihan *counter terrorism* di Sentul pada September 2013. Latihan bersama ini merupakan upaya *capacity building* yang dilakukan Indonesia bersama dengan negara-negara lainnya yang terlibat dalam ADMM Plus. Dalam hal ini, Indonesia berkepentingan untuk membagikan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki kepada negara-negara yang terlibat. Selain itu dalam konteks *capacity building* untuk Indonesia sendiri, latihan bersama ini menjadi kesempatan untuk belajar bagaimana negara-negara lain yang lebih maju mengelola kerjasama antar K/L terkait secara komprehensif dalam menanggulangi terorisme. Dengan menjadi tuan rumah, Indonesia dapat lebih banyak mengundang K/L untuk sama-sama belajar (wawancara, Feb 2018, Universitas Pertahanan).

Indonesia juga berfokus pada *Maritime Security* (MS) dan *Counter Terrorism* (CT) yang sudah berhasil melakukan latihan bersama di Brunei Darussalam dan Singapura pada Mei 2016 yaitu *ADMM Plus Maritime Security and Counter Terrorism Exercise* (MCTX) dengan skenario penanggulangan ancaman terorisme di wilayah laut. Selain itu, kemajuan kerjasama dalam keamanan maritim ditandai dengan dibentuknya *ADMM Direct Communication Link* (DCL) yang merupakan jalur komunikasi cepat untuk merespon situasi darurat dalam konteks keamanan maritim di kawasan (Sekretariat Nasional ASEAN - Indonesia, 2017).

Dengan meningkatnya kapasitas negara Indonesia dalam upaya pemberantasan terorisme maka Indonesia lebih mampu menanggulangi

terorisme. Hal tersebut terbukti dari indeks yang dilakukan oleh *Global Terrorism Index* dimana posisi Indonesia membaik sejak tahun 2003. Indonesia berada di peringkat 38 di tahun 2017 dari 163 negara. Berbeda jauh saat GTI mengeluarkan hasil surveinya dimana Indonesia berada di posisi 8 dari 163 negara yang beresiko terkena dampak serangan teroris (*Global Terrorism Index*, 2017). Hal lain juga dapat membuktikan bahwa Indonesia menjadi tempat latihan banyak negara dalam menanggulangi terorisme. Negara-negara lain banyak ingin mempelajari cara Indonesia menangani terorisme, salah satunya dengan program deradikalisasi yang dianggap efektif sebagai *soft approach*, karena Indonesia tidak hanya menggunakan *hard approach* dalam penanggulangan terorisme.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kemekopolhukam dan BNPT juga dapat menggambarkan perubahan citra yang dimiliki oleh Indonesia. Keduanya memiliki pendapat yang sama bahwa Indonesia menjadi tolak ukur akan upaya menangani terorisme di kawasan Asia Tenggara. Pengalaman yang Indonesia alami menjadi pelajaran sehingga kapabilitas Indonesia dalam hal ini jauh lebih baik sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih aman dari ancaman terorisme. Perubahan pandangan yang tergambar dari Buku Putih Pertahanan Australia juga dapat menjadikan bukti bahwa Indonesia sudah diakui dan menjadi mitra yang baik dalam menangani masalah terorisme.

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi juga menyampaikan pada pertemuan ASEAN – Uni Eropa pada Oktober 2016, bahwa Indonesia menekankan tiga hal pokok dalam pemberantasan terorisme. Pertama, penguatan kerjasama kontra terorisme. Lalu yang kedua adalah penguatan kemampuan unit anti teror dan pencegahan terorisme dunia maya, dan yang ketiga adalah pengarusutamaan pendekatan *soft power* melalui pendidikan, peningkatan peran perempuan, masyarakat sipil, serta organisasi kemasyarakatan dan agama. Pendekatan *soft power* ini sangat di apresiasi oleh sejumlah negara Uni Eropa karena menekankan nilai-nilai toleransi dan moderasi di masyarakat (*Antara News*, 2016).

Perspektif yang terakhir adalah *desired future image*, ini merupakan citra yang ingin Indonesia capai atau bagaimana Indonesia ingin dilihat oleh dunia dimana hal ini seiring dengan tujuan nasional Indonesia yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagai penciptaan lingkungan yang aman dan damai (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015, hal. 26). Selain itu juga Indonesia ingin menciptakan kawasan yang aman dan stabil untuk keberlangsungan upaya mencapai *prosperity* dan *security* yang menjadi cita-cita ASEAN. Yang tidak kalah pentingnya adalah, Indonesia ingin menjamin keamanan nasionalnya dari ancaman terorisme dengan mengajak negara-negara lain bekerjasama untuk memberantas hal tersebut (wawancara, Feb 2018, Kemlu).